

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu negara atau daerah selama suatu periode. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, perlu dilakukan konsolidasi data informasi keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal pemerintah secara nasional.

Pemerintah daerah, terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau yang disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), oleh karena itu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibutuhkan konsolidasi agar menjadi 1(satu) laporan keuangan yang terintegrasi. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD yang menjadi satu entitas tunggal yaitu LKPD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur (Kantor Pusat – Kantor Cabang), SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. SKPKD mempunyai 2(dua) fungsi, yang pertama sebagai konsolidator atau entitas pelaporan dan yang kedua SKPKD sebagai entitas akuntansi atau SKPD.

Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak mewakili pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan dan konsolidator.

Dalam proses penyusunan LKPD, diperlukan verifikasi dan rekonsiliasi dalam rangka meningkatkan kualitas data yang disajikan serta memastikan konsistensi data gabungan dari seluruh wilayah sehingga data yang dihasilkan akan terintegrasi dari mulai unit terkecil sampai dengan data daerah kabupaten.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berfungsi untuk menunjang urusan pemerintah daerah khususnya bidang aset dan keuangan selain pendapatan serta sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sementara bidang pendapatan dikelola secara khusus oleh BAPPENDA.

Proses penyusunan LKPD di BPKAD Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Bupati Bogor No. 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam mendukung program kerja yang dilakukan, BPKAD Kabupaten Bogor menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) serta Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Oleh karena itu hal ini menarik penulis untuk memaparkan bagaimana proses pengkonsolidasian laporan keuangan SKPD yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dilatar belakang, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana siklus akuntansi yang berada dipemerintahan daerah?
2. Bagaimana proses rekonsiliasi aset dalam konsolidasi laporan keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana proses rekonsiliasi pendapatan dengan BAPPENDA dalam konsolidasi laporan keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor?
4. Mengapa kegiatan belanja tidak dilakukan rekonsiliasi secara khusus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana proses rekonsiliasi laporan keuangan dan konsolidasi yang terjadi yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor?
6. Bagaimana sistem pengendalian yang ada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor?



3 Tujuan Penulisan

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Tujuan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan informasi mengenai siklus akuntansi yang berada di pemerintahan daerah
2. Menguraikan mekanisme proses rekonsiliasi aset yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
3. Menguraikan mekanisme proses rekonsiliasi pendapatan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
4. Menguraikan mengenai proses kegiatan belanja yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
5. Menguraikan mekanisme proses rekonsiliasi laporan keuangan dan konsolidasi yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
6. Menguraikan sistem pengendalian internal yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.
2. Bagi Akademik, sebagai tambahan referensi mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.



3. Bagi Instansi BPKAD, sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam Teknik Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.